



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Menkumham Baru Laporkan UU MD3 Ke Presiden : Wah Fatal Banget, Peat Aja Pak!
Tanggal : Jumat, 23 Februari 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 12

Menkumham Baru Laporkan UU MD3 Ke Presiden **Wah Fatal Banget, Pecat Aja Pak!**

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendapat perhatian serius karena tidak melaporkan proses pembahasan revisi UU MD3 kepada Presiden Joko Widodo. Kelakuan Yasonna dianggap fatal karena banyak masyarakat menolak rancangan yang sudah disahkan oleh DPR.

KELAKUAN Menteri Yasonna yang tidak melaporkan proses pembahasan revisi UU MD3 kepada Presiden Joko Widodo, dan tiba-tiba disahkan Dewan, menjadi bahan kicauan warganet. Sikap pemerintah yang tidak mengeluarkan nota keberatan saat pembahasan berlangsung membuat banyak pihak menilai pemerintah setuju atas revisi UU MD3.

"Jadi tanda tanya jg, kok bawahan berani main tikung bos nya. Trus partai pendukung presiden jg mendukung pengesahan UU ini. Tp skrg presiden gak mau ttd. Bingung," cuit akun @ditnurhadi.

"Diminta kpd Presiden utk #copotYasonna," kata akun @IsarMamak.

"Pantesan pas ditanya wartawan ttg uud md3 jokowi jawabnya singkat padat dan ga bermakna," heran akun @titisuharti.

"berhentikan saja si Yasonna itu Pak @jokowi. banyak sekali persoalannya," minta akun @didikpambudi.

"ANEH ADA MENTERI KO TIDAK LAPOR SAMAPRESIDENNYA UNTUK HAL YANG SEPENTING ITU ???" tanya akun @yudibiru1.

"pecat aja menteri yg gak berfungsi semestinya," tambah akun @budhidharta.

Sebelumnya, Menkumham dikabarkan tidak melaporkan proses pembahasan revisi UU MD3 di DPR RI, hingga akhirnya pengesahan dilakukan oleh para anggota dewan. Yasonna beralasan waktu yang padat baru bisa dilakukan baru-baru ini untuk melaporkan kepada presiden.

"Waktunya itu sangat padat, jadi baru tadi (Selasa kemarin) saya melaporkan," ujar Yasonna, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa lalu (20/2).

Dia membantah kabar Jokowi marah besar karena baru mendapatkan laporan atas pengesahan UU MD3. Dia menilai, pengesahan UU MD3 yang isinya mengatur internal para wakil rakyat dan sikap pemerintah menjaga undang-undang tidak merugikan masyarakat.

Dari Cikini, pengamat politik LIMA Ray Rangkuti menegaskan, kesalahan Yasonna yang tidak melaporkan proses pembahasan UU MD3 ke Presiden, sangat fatal. Pegiat demokrasi ini juga meminta Presiden memecat menteri yang berasal dari PDI Perjuangan tersebut.

"Sepenting dan segawat itu, bisa mengancam elektabilitas Presiden sekaligus mengancam demokrasi, kok, enggak sampai ke Presiden? Pecat saja itu menteri. Kami ingatkan, pecat itu Pak Yasonna," tegas Ray Rangkuti, di Cikini, Jakarta, Rabu (21/2) lalu.

"Sekarang kemungkinan itu (UU MD3) tak ditandatangani Presiden, karena reaksi publik. Itu bagus secara politik bagi dirinya (Presiden) sendiri, tetapi secara hukum sama saja (tetap berlaku UU MD3)," tandas Ray.

Warganet juga geram dengan alasan Menkumham bahwa UU MD3 tidak merugikan masyarakat kebanyakan. Padahal, beberapa pasal di dalam UU MD3 menjadi kontroversi hangat di tengah-tengah masyarakat.

"Menteri2 jaman skrg kok parah ya kualitasnya," sindir akun @BaniKecebong.

"Apa iya menteri melakukan sesuatu tanpa kontrol presiden?" sambung @kholice112.

Akun @PotaCiumNitrat menyarankan Presiden Jokowi agar mempertimbangkan posisi Yasonna disertakan dalam reshuffle apabila dalam waktu dekat ini ada rencana rombak-rombak kabinet. "Menteri ini lalai... Dan ini fatal akibatnya... Perlu jg dipertimbangkan andai ada reshuffle."

"Sesuai apa yg selalu di bicarakan pengamat.. bukan pa jokowi yg berpengaruh,, tp orang2 di sekitarnya yg berulah," sahut akun @jajay_devghan.

"Kayak ga tau aja, orang ini kan bekas DPR juga, pasti lindungi konco2 lawas," sindir akun @SamSoegi.

Presiden telah menerima UU MD3 yang telah disahkan DPR. Jokowi mengaku telah mengamati reaksi masyarakat mengenai pengesahan UU tersebut dan hingga kini belum menentukan dan masih mengkaji dan menimbang apakah akan menandatangani atau tidak menandatangani.

"Saya tanda tangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah, ini mendukung penuh. Enggak saya tanda tangani juga itu (UU MD3) tetap berjalan. Jadi, masih dalam kajian, ya," kata Jokowi.

"Pecat lah.. Jgn terlalu bnyk dibahas.. sdh pasti bnyk hidden agendanya.. cc Bpk @jokowi," tegas akun @nosharahap. ■ MHS